



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI**  
**KE PROVINSI PAPUA BARAT**  
**PADA RESES MASA PERSIDANGAN V**  
**TAHUN SIDANG 2018-2019**  
**TANGGAL 26 s.d. 30 JULI 2019**

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, DPR RI, sebagai lembaga perwakilan, mempunyai fungsi di bidang legislasi, di bidang anggaran dan di bidang pengawasan.

Dalam melaksanakan fungsi di bidang pengawasan, DPR RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan masalah aktual yang menjadi perhatian dan berkaitan langsung dengan kepentingan dan hayat hidup banyak masyarakat.

Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Sedangkan di dalam Pasal 59 ayat (3) juga menyebutkan bahwa Komisi dapat mengadakan kunjungan kerja di masa reses yang hasilnya akan dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.

Komisi IX DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019 ini memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja secara paralel ke 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Papua Barat.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja ini, Komisi IX DPR RI- yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pengawasan obat dan makanan serta jaminan kesehatan sosial mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung, baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN sekaligus memonitor pelaksanaan program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di daerah tujuan kunjungan kerja.

Selain itu, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI.

Hasil kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan dengan kementerian terkait dan mitra kerja lainnya.

## **1.2 Dasar Kegiatan**

- a. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja berkelompok dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019.
- b. Keputusan Rapat Internal Komisi IX DPR RI pada 9 Mei 2019

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

- a. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI.
- b. Menggali informasi realisasi program dan kegiatan dan anggaran yang dibiayai APBN.
- c. Memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi IX DPR RI di Provinsi Papua Barat.
- d. Menyerap aspirasi masyarakat Papua Barat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI.

## **1.4 Pihak yang diundang**

Dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Papua Barat, telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat khususnya dengan Pemerintah Kota Sorong dan instansi terkait dengan kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pengawasan obat dan makanan, Jaminan Sosial dan lain-lain, yaitu:

1. Walikota Sorong
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Kadinkes Kota Sorong
3. Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disduknertrans) Provinsi Papua Barat dan Kadisnakertrans Kota Sorong
4. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat
5. Direktur RSUD Selesolu Kota Sorong
6. Kepala Divisi Regional X BPJS Kesehatan
7. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa), Kepala kantor cabang Sorong
8. Kepala BLK Manokwari dan Kepala BLKI Sorong

## II. GAMBARAN UMUM

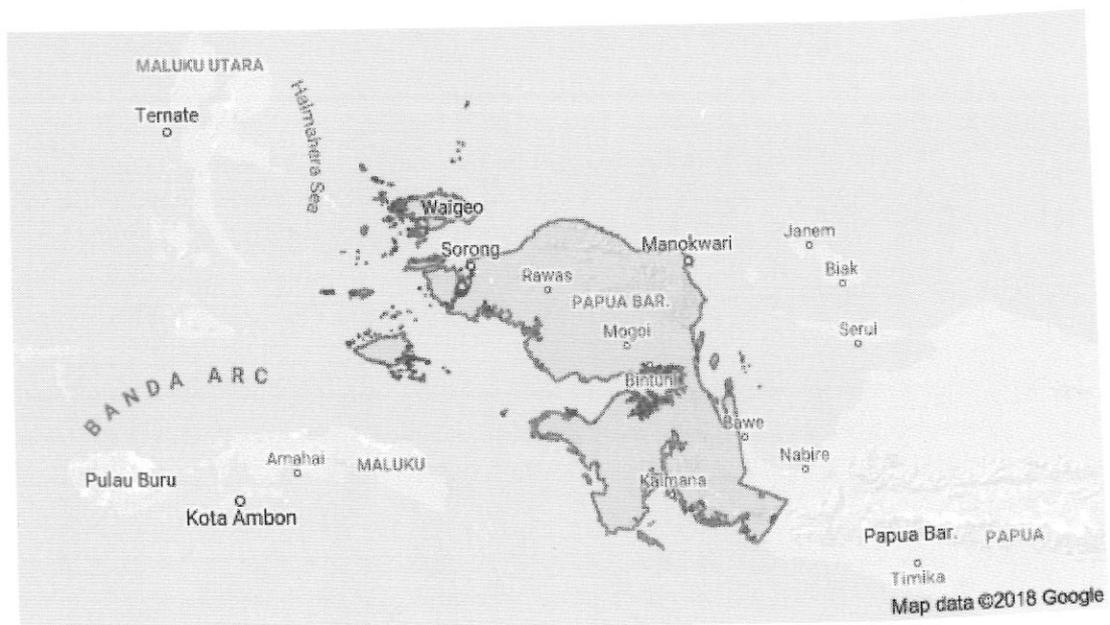
### 2.1 Gambaran Umum Provinsi Papua Barat

Papua Barat adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Ibukotanya adalah Manokwari. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus.

Secara administrative, provinsi Papua Barat wilayah Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, 154 distrik, dan 1.361 kampung dengan luas wilayah secara keseluruhan sebesar 97.024,37 km<sup>2</sup> (berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2008).

Secara geografis terletak pada 124°-132° Bujur Timur dan 0°-4° Lintang Selatan, tepat berada di bawah garis khatulistiwa dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut. Kabupaten Fakfak merupakan kabupaten tertinggi dengan ketinggian 10-100 meter di atas permukaan laut, sedangkan kota-kota lainnya berkisar antara 10-50 meter di atas permukaan laut. Batas geografis Provinsi Papua Barat adalah:

Sebelah Utara	: Samudera Pasifik
Sebelah Selatan	: Laut Banda (Provinsi Maluku)
Sebelah Barat	: Laut Seram (Provinsi Maluku)
Sebelah Timur	: Provinsi Papua



Gambar 1. Peta Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua Barat dibagi dalam beberapa kabupaten dan Kota, yaitu sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Pusat pemerintahan
1	Kabupaten Fakfak	Fakfak
2	Kabupaten Kaimana	Kaimana
3	Kabupaten Manokwari	Manokwari
4	Kabupaten Manokwari Selatan	Ransiki
5	Kabupaten Maybrat	Kumurkek
6	Kabupaten Pegunungan Arfak	Anggi
7	Kabupaten Raja Ampat	Waisai
8	Kabupaten Sorong	Aimas
9	Kabupaten Sorong Selatan	Teminabuan
10	Kabupaten Tambrauw	Fef
11	Kabupaten Teluk Bintuni	Bintuni
12	Kabupaten Teluk Wondama	Rasiei
13	Kota Sorong	Sorong

Provinsi Papua Barat mempunyai potensi yang luar biasa, baik itu pertanian, pertambangan, hasil hutan maupun pariwisata. Mutiara dan rumput laut dihasilkan di kabupaten Raja Ampat sedangkan satu-satunya industri tradisional tenun ikat yang disebut kain Timor dihasilkan di kabupaten Sorong Selatan. Sirup pala harum dapat diperoleh di kabupaten Fak-Fak serta beragam potensi lainnya. Selain itu wisata alam juga menjadi salah satu andalan Irian Jaya Barat, seperti Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang berlokasi di kabupaten Teluk Wondama. Taman Nasional ini membentang dari timur Semenanjung Kwatisore sampai utara Pulau Rumberpon dengan panjang garis pantai 500 km, luas darat mencapai 68.200 ha, luas laut 1.385.300 ha dengan rincian 80.000 ha kawasan terumbu karang dan 12.400 ha lautan.

Disamping itu baru-baru ini, ditemukan sebuah gua yang diklaim sebagai gua terdalam di dunia oleh tim ekspedisi speologi Perancis di kawasan Pegunungan Lina, Kampung Irameba, Distrik Anggi, Kabupaten Manokwari. Gua ini diperkirakan mencapai kedalaman 2000 meter. Kawasan pegunungan di Papua Barat masih menyimpan misteri kekayaan alam yang perlu diungkap.

## 2.2 Kondisi Penduduk

Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 jumlah penduduk di Provinsi Papua pada 2018 mencapai 3,3 juta jiwa. Angka tersebut terdiri dari 1,73 juta jiwa laki-laki dan 1,57 juta jiwa perempuan. Populasi usia muda (0-34 tahun) mendominasi lebih dari 71% penduduk di provinsi paling timur Indonesia ini. Pada tahun 2015, penduduk Provinsi Papua Barat baru mencapai 3,15 juta jiwa dan diproyeksi meningkat 35,4% menjadi 4,27 juta jiwa pada 2045.

Untuk jumlah penduduk miskin, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat penduduk miskin di Papua Barat pada Maret 2018 sebanyak 214,47 ribu jiwa atau sekitar 23,01% dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk miskin terus menurun dan pada September 2018 turun menjadi 213,67 ribu jiwa (22,66%).

### **2.3 Kondisi Ketenagakerjaan**

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat dapat dikatakan cukup melimpah. Hal ini tercermin dari struktur penduduk Provinsi Papua Barat yang tergolong dalam struktur penduduk usia menengah, maka perkembangan penduduk usia kerja akan tumbuh relatif cepat. Penduduk usia kerja merupakan penduduk dengan usia 15 tahun ke atas. Umumnya, penduduk dengan usia pada rentang tersebut memiliki kemampuan untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan (produktif). Pada tahun 2014, tercatat kurang lebih 583 ribu penduduk Provinsi Papua Barat (68,30 persen) merupakan penduduk usia kerja.

Penduduk bekerja di Provinsi Papua Barat didominasi penduduk pada rentang usia 30 hingga 34 tahun dan 25 hingga 29 tahun. Sementara itu, bila dilihat dari sisi pendidikan, hampir 40 persen penduduk bekerja memiliki pendidikan yang relatif rendah (pendidikan tertinggi SD juga tidak/ belum pernah sekolah). Selanjutnya, pekerja di Provinsi Papua Barat juga didominasi oleh lulusan SLTA. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan SLTA di Provinsi Papua Barat cenderung memilih untuk langsung bekerja daripada melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Angkatan Kerja Papua Barat tahun 2017 berjumlah 430.478 orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2016. Begitu pula dengan penduduk bekerja bila dibanding tahun 2016 tergambar dengan turunnya jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 3.175 orang dari total penduduk sebanyak 1.060 juta. Penurunan terjadi terutama di sector Konstruksi dan sector perdagangan. Sedangkan sektor pertanian dan sektor industri mengalami peningkatan jumlah penduduk bekerja.

Di tahun yang sama, penduduk bekerja didominasi oleh penduduk bekerja pada kegiatan informal sebesar 59,10 persen. Sejalan dengan turunnya jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga mengalami penurunan. TPAK pada Agustus 2017 tercatat sebesar 67,47 persen, turun 2,73 persen dibanding semester lalu, dan turun 2,58 persen dibanding setahun lalu. Penurunan TPAK memberi indikasi adanya penurunan potensi ekonomi dari sisi pasokan (suplay) tenaga kerja.

Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2017, TPAK laki-laki 78,69 persen sedangkan TPAK perempuan hanya 54,66 persen. Selama setahun terakhir, sektor-sektor yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja adalah Sektor Industri (2.27persen), Sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi (0.99 persen), Sektor lembaga keuangan, real estate (0.91 persen); dan Sektor Perdagangan (0.79 persen).

Pada Agustus 2017, terdapat 34.53 persen penduduk bekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam seminggu) mencakup 12.27 persen setengah penganggur dan 22.26 persen pekerja paruh waktu

Pembangunan ketenagakerjaan di Papua Barat hingga saat ini belum mampu mengatasi tantangan jaman sehingga sulit bersaing dengan angkatan kerja pendatang. Hal ini dikarenakan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan lulusan Sekolah Dasar (SD) yang mencapai 61,60 persen.

Hingga saat ini, penduduk bekerja di Papua Barat banyak yang berstatus pekerja tidak dibayar yang mencapai 37,14 persen. Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT), sekolah menengah kejuruan (SMK) berada pada posisi tertinggi mencapai 14,03 persen, diikuti lulusan universitas 10,44 persen. TPT terendah terdapat pada SD yang hanya 1,41 persen. Lulusan SD ke bawah mendominasi lapangan pekerjaan karena mereka cenderung tidak pilih-pilih mencari pekerjaan.

## **2.6 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Papua Barat**

Penyusunan IPK didasarkan pada umpan balik dari keberhasilan perencanaan tenaga kerja yang telah dilakukan daerah (provinsi) Indikator penilaian yakni perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja serta jaminan sosial tenaga kerja.

Dari hasil pengukuran IPK, ada empat isu yang harus digenjut dalam indikator utama IPK yakni pengupahan dan kesejahteraan pekerja, pelatihan dan kompetensi kerja, hubungan industrial Empat indikator itu masih cukup rendah, jadi harus digenjut melalui periodisasi program lebih baik dan alokasi anggaran lebih memadai.

## **III. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

### **UMUM**

#### **3.1 Kondisi ekonomi**

Pada tahun 2018, ekonomi Papua Barat tumbuh sebesar 6,24% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2017 yang tercatat sebesar 4,01%. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat 2018 ini tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya tercatat 5,17%. Peningkatan pertumbuhan ini terutama didorong oleh kuatnya net ekspor yang tercatat tumbuh meningkat dari -1,37% menjadi 25,99%. Disamping net ekspor, konsumsi rumah tangga juga tercatat cukup baik sebesar 5,17%, didukung oleh daya beli masyarakat yang baik ditengah inflasi terkendali, pendapatan meningkat, dan tingkat keyakinan masyarakat

yang tinggi, meskipun angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2017 sebesar 6,65%.

Adapun, realisasi pendapatan daerah Provinsi Papua Barat pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 100,70%, lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar 96,68%. Peningkatan ini didorong oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memenuhi target dan pendapatan transfer yang sesuai jadwal. Sementara itu, realisasi belanja daerah Provinsi Papua Barat hingga triwulan IV 2018 tercatat sedikit lebih rendah dengan realisasi sebesar 86,87% terutama didorong oleh turunnya realisasi Belanja Tidak Langsung menjadi sebesar 91,76% dari triwulan IV 2017 sebesar 98,31%. Untuk belanja Pemerintah Pusat di Papua Barat, realisasi pada triwulan IV 2018 tercatat sebesar 94,43% yang lebih tinggi daripada triwulan yang sama di tahun sebelumnya.

Secara kumulatif, ekonomi Papua Barat tahun 2019 diperkirakan tetap tumbuh walaupun lebih rendah dibanding tahun 2018. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Papua Barat diperkirakan berada pada kisaran 3,9% - 4,3%, melambat dibanding pertumbuhan pada tahun 2018. Ekonomi Papua Barat sangat didominasi dari sektor migas terutama gas alam cair atau LNG (*liquefied natural gas*). Perlambatan ini disebabkan oleh melambatnya kinerja LNG di tahun 2019.

### **3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus mengalami peningkatan. IPMG tahun 2018 Indonesia sebesar 71,39, tumbuh 0,58 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan IPM nasional ini juga diikuti dengan kenaikan IPM Provinsi Papua Barat yang naik kelas dari kategori rendah ke kategori sedang.

Sesuai kategori IPM dari UNDP (*United Nations for Development Program*) bahwa kategori rendah adalah IPM dibawah 60, IPM diantara 60 hingga 70 masuk kategori tingkat pertumbuhan sedang dan dari 71 sampai 80 masuk kategorit tingkat pertumbuhan tinggi 71 sampai 80.

IPM Provinsi Papua Barat tahun 2018 sebesar 63,74 meningkat 0,75 poin disbanding tahun sebelumnya yang berada pada level 62,99. IPM Provinsi Papua Barat tahun 2018 mencatat pertumbuhan positif sebesar 1,19 persen disbanding tahun sebelumnya. Angka ini menjadikan Provinsi Papua Barat menduduki peringkat ke-3 pertumbuhan tercepat se-Indonesia. Namun, pembangunan manusia Provinsi Papua Barat masih dalam kategori sedang yang tidak berubah sejak tahun 2012.

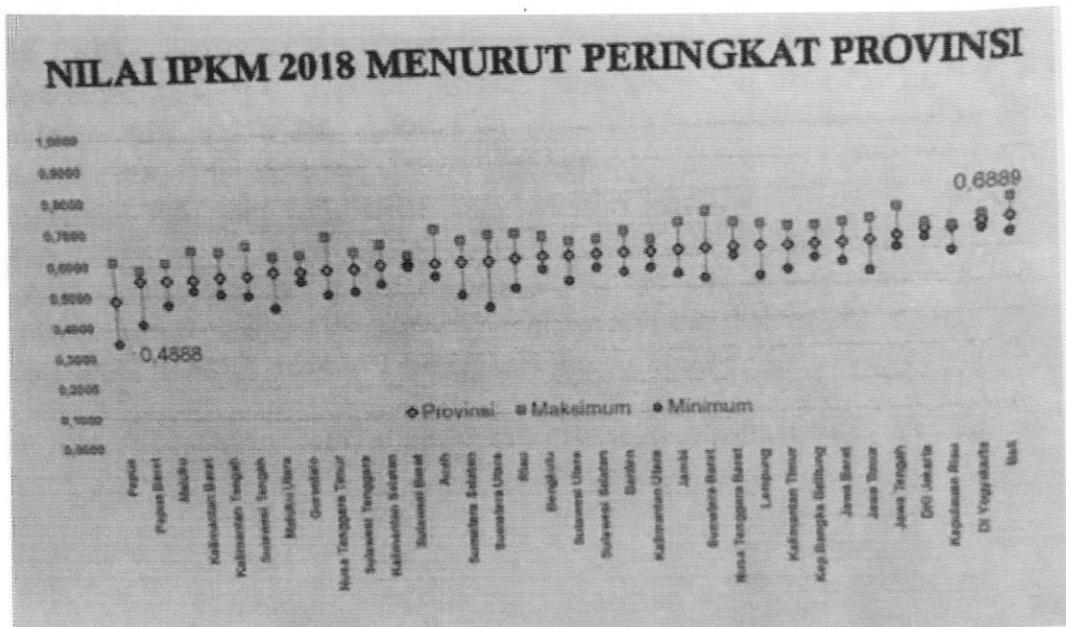
**BIDANG KESEHATAN**

**3.3 Anggaran Kesehatan**

APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2019 mencapai Rp8.479.203.287.742,- naik sebesar 15,89% disbanding tahun 2018 yang sebesar Rp7.316.831.455.000,-. Dari total APBD ini, dialokasikan untuk kesehatan sebesar Rp 249.041.011.486,- yang meningkat dibanding tahun 2018 yang hanya sebesar Rp125.753.004.612,04 dimana belanja modal sebesar 62,03% yang sebagian besar untuk pembangunan RSUD Provinsi. Dibanding total APBD, alokasi anggaran untuk kesehatan hanya 2,94% yang masih jauh dari amanat UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang sebesar 10 % dari APBD di luar gaji.

**3.4 Capaian Pembangunan Kesehatan**

Untuk mengetahui pencapaian pembangunan kesehatan, data Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) digunakan. IPKM tahun 2018 telah resmi dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI dimana IPKM tertinggi adalah Provinsi Bali dan terendah adalah Provinsi Papua. Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat IPKM tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu meningkat dari 0,4966 menjadi 0,5491. Namun, secara peringkat menurun dari peringkat 27 menjadi peringkat 33.



### 3.5 Jaminan Kesehatan

Total jumlah peserta JKN tahun 2018 yaitu 1.278.000 orang dengan total jumlah penduduk sebanyak 1.327.583 orang sehingga cakupannya mencapai 96,27 %. Penduduk yang belum mempunyai jaminan kesehatan sebanyak 49.583 orang. Adapun rincian jenis kepesertaan JKN sebagai berikut:

No.	RINCIAN	JUMLAH
1.	PBI APBN	764.182
2.	PBI APBD Pemerintah Kabupaten	152.947
3.	PBI APBD Pemerintah Provinsi	73.988
4.	PPU	204.987
5.	PBPU	67.505
6.	BP	14.391
7.	Total Peserta JKN	1.278.000
8.	Penduduk menurut Dinas Kependudukan	1.327.583
9.	Persentase Cakupan	96,27
9.	Yang Belum Memiliki Jaminan Kesehatan	49.583

Masing-masing kabupaten/kota telah mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan daerahnya dengan JKN. Dalam rangka *Universal Health Coverage* (UHC), sejak tahun 2018 Pemerintah Provinsi Papua Barat turut berkontribusi membayarkan premi penduduk asli Papua di 6 Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2018.

No.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PBI
1.	Kabupaten Manokwari	6.775
2.	Kabupaten Manokwari Selatan	15.203
3.	Kabupaten Pegunungan Arfak	6.821
4.	Kabupaten Teluk Wondama	11.850
5.	Kabupaten Sorong	7.003
6.	Kota Sorong	26.336
<b>JUMLAH</b>		<b>73.988</b>

Pembayaran premi ini menggunakan dana Otonomi khusus (Otsus) dan karena Otsus telah dialokasikan ke 90% ke Kabupaten/Kota, maka pembayaran premi JKN pada tahun 2020 dan seterusnya akan dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun kendala yang masih dihadapi yaitu 1) perihal validasi kepesertaan PBI APBN dan kepemilikan kartu kepesertaan JKN-KIS serta 2) komitmen Kabupaten/Kota untuk mempertahankan UHC.

### 3.6 Fasilitas Kesehatan dan SDM Kesehatan

Total fasilitas kesehatan di Provinsi Papua Barat yaitu 159 Puskesmas yang 52 diantaranya sudah terakreditasi dan 17 rumah sakit dimana 14 rs sudah terakreditasi oleh KARS. Jumlah total tempat tidur (TT) rumah sakit sebanyak 1.479 TT dengan 38,8% diantaranya adalah kelas III. Dengan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 959.617 jiwa, maka rasio TT dengan penduduk adalah 1:649.

**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2018.**

No	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH RS	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH POLINDES/ POSKESDES
1.	Kabupaten Fakfak	1	10	49
2.	Kabupaten Kaimana	1	8	**)
3.	Kabupaten Teluk Wondama	1	6	17
4.	Kabupaten Teluk Bintuni	1	20	27
5.	Kabupaten Manokwari	5	14	15
6.	Kabupaten Sorong Selatan	1	15	50
7.	Kabupaten Sorong	1	18	16
8.	Kabupaten Raja Ampat	1	19	15
9.	Kabupaten Tambrauw	*)	10	3
10.	Kabupaten Maybrat	*)	14	9
11.	Kabupaten Manokwari Selatan	*)	6	**)
12.	Kabupaten Pegunungan Arfak	-	9	**)
13.	Kota Sorong	6	10	**)
<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>	<b>159</b>	<b>201</b>

\*) Saat ini sedang dibangun atau dalam tahap persiapan operasional RS Pratama.  
\*\*) Belum didapatkan update datanya.

Adapun jumlah SDM kesehatan di Provinsi Papua Barat di tahun 2018 yaitu 360 orang tenaga medis, 2.819 perawat, 1.256 bidan, 220 petugas kesehatan masyarakat, 116 sanitarian, 179 ahli gizi dan 112 apoteker.

### 3.7 Permasalahan Kesehatan

Permasalahan kesehatan menonjol di Provinsi Papua Barat didominasi oleh hampir semua penyakit menular kecuali rabies dan schistosomiasis. DBD sudah mulai menjadi ancaman dengan Incidence rate 229,6/100.000

penduduk di tahun 2018. TB menjadi permasalahan serius dengan penemuan kasus baru sekitar 58% dengan angka keberhasilan pengobatan hanya 35% (terendah di tingkat nasional).

Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi dan meningkat tiga tahun terakhir. Di tahun 2017, jumlah ibu yang meninggal karena melahirkan berjumlah 37 orang, 2018 meningkat menjadi 44 orang dan di tahun 2019 sebanyak 49 orang. Kematian tertinggi disebabkan oleh pendarahan dan informasi dari layanan bahwa jumlah kehamilan dan persalinan remaja meningkat.

### **3.8 Imunisasi**

Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Papua Barat tahun 2018 baru sebesar 84,2 % (target nasional 90%), sementara untuk tingkat kabupaten/kota ada 3 kabupaten yang telah mencapai target yaitu Fakfak, Tambrauw dan Manokwari Selatan. Adapun untuk kampanye MR tahun 2018, Papua Barat berhasil menjadi Provinsi yang mencapai target dan tertinggi dalam pencapaiannya yaitu 102,63%. Begitu juga untuj sub PIN Polio 2019 karena ditemukannya kasus polio dimana capaian putaran pertama sebesar 104% dan putaran kedua 103%.

## **BIDANG KETENAGAKERJAAN**

### **IV. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan dengan Pemerintah Daerah dan seluruh SKPD terkait serta jawaban tertulis yang disampaikan, berikut beberapa rekomendasi yang kami berikan.

### **BIDANG KESEHATAN**

1. Terkait permasalahan utama tentang perizinan incinerator rumah sakit untuk membakar sampah medis, Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk secara serius melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan titik temu dengan Kementerian Lingkungan Hidup sehingga ada solusi tentang sampah medis yang harus ditangani secara paripurna untuk mencegah penularan penyakit dan juga mencegah sampah medis disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Komisi IX DPR RI juga merekomendasikan untuk Anggota Komisi IX DPR RI periode 2019-2024 untuk membentuk Panja Penanggulangan Limbah Medis untuk pembahasan yang lebih mendalam.

2. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah Daerah untuk melaksanakan amanat UU Kesehatan untuk mengalokasikan 10% APBD di luar gaji untuk anggaran kesehatan sehingga pembangunan kesehatan bisa diakselerasi. Komisi IX DPR RI juga mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri untuk pelaksanaan amanat UU Kesehatan ini sehingga dipatuhi oleh seluruh Pemerintah Daerah.
3. Dengan tingginya angka penderita gagal ginjal di Provinsi Papua Barat dan tidak ada satupun fasilitas cuci darah dan pasien harus dirujuk ke Makasar atau Manado, maka Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk memberikan prioritas dan pendampingan untuk Pemerintah Papua Barat untuk segera menyediakan fasilitas cuci darah bagi pasien gagal ginjal.
4. Dengan begitu tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular di provinsi Papua Barat, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan untuk terus mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk terus melakukan program Germas dan mencetak kader-kader kesehatan daerah mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS). Harus ada upaya yang terus menerus dan lintas sector untuk menggerakkan masyarakat Papua Barat yang sangat multikulturalan dan multi etnis dengan kesenjangan yang lumayan lebar antara wilayah perkotaan dan pedalaman.

## **BIDANG KETENAGAKERJAAN**

### **V. PENUTUP**

Demikian Laporan Komisi IX DPR RI dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat ini kami sampaikan. Atas perhatian, jawaban, serta kerjasama dari Pemerintah Provinsi Papua Barat dan semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

**Jakarta, 1 Agustus 2019**

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI  
KE PROVINSI PAPUA BARAT  
KETUA TIM,**

**Ttd**

**DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, ST., M.I. POL**

**A- 415**